

THESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS
KABUPATEN KENDAL**



Wahyu Nur Musdalifah

NIM: 21.C2.0025

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS
KABUPATEN KENDAL**

THESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2



Diajukan oleh :

Wahyu Nur Musdalifah

NIM: 21.C2.0025

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Nur Musdalifah

NIM : 21.C2.0025

Progdi / Konsentrasi : Magister Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL” tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2022
Yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
79C2AJX466955126

(Wahyu Nur Musdalifah)

NIM: 21.C2.0025



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN
TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS
KABUPATEN KENDAL

Diajukan oleh : Wahyu Nur Musdalifah
NIM : 21.C2.0025
Tanggal disetujui : 26 Januari 2022
Telah setuju oleh
Pembimbing 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.
Pembimbing 2 : Hartanto
Penguji 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.
Penguji 2 : Hartanto
Penguji 3 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.
Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=21.C2.0025

THESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL

Diajukan Oleh

Wahyu Nur Musdalifah
NIM 21.C2.0025

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum

tanggal 7 Januari 2022

Pembimbing II



dr. Hartanto, M.Med., Sc

tanggal 7 Januari 2022

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Nur Musdalifah

NIM : 21.C2.0025

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : TESIS

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SEBAGAI PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KABUPATEN KENDAL”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 31 Januari 2022

Yang menyatakan,



(Wahyu Nur Musdalifah)

NIM: 21.C2.0025

KATA PENGANTAR

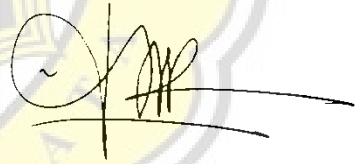
Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul, **”Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana Di Puskesmas Kabupaten Kendal”**. Penulis menyadari tersusunnya Tesis ini karena adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, SPsi., MSi, selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati, SH., MH, selaku Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyusunan tesis.

6. dr. Hartanto, M.Med. Sc, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan pengajaran dan pemahaman pengetahuan di bidang ilmu hukum kesehatan.
8. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik fisik maupun moril, sehingga terselesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang positif guna perbaikan yang lebih baik. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 26 Januari 2022



Wahyu Nur Musdalifah
NIM 21.C2.0025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Perumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Pemikiran	14
1. Kerangka Konsep.....	14
2. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Desain Penelitian	25
4. Jenis Data.....	26
5. Metode Pengumpulan Data.....	28

6. Metode Sampling.....	29
7. Metode Analisis	31
H. Penyajian Tesis	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tenaga Kebidanan.....	33
B. Peran Bidan	40
C. Wewenang	43
D. Perlindungan Hukum.....	52
E. Tindakan Medis dan Standar Prosedur Operasional	55
F. Keluarga Berencana	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
1. Gambaran Umum.....	64
a. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	64
b. Gambaran Umum Puskesmas Objek Penelitian	68
2. Hasil Wawancara.....	79
a. Hasil Wawancara Terkait Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Bidan	79
b. Hasil Wawancara Terkait dengan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Bidan ...	97
B. Pembahasan	105
1. Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang dalam Melakukan Pelayanan Keluarga Berencana	105
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang dalam Pelayanan Keluarga Berencana	134

BAB IV PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN.....	156



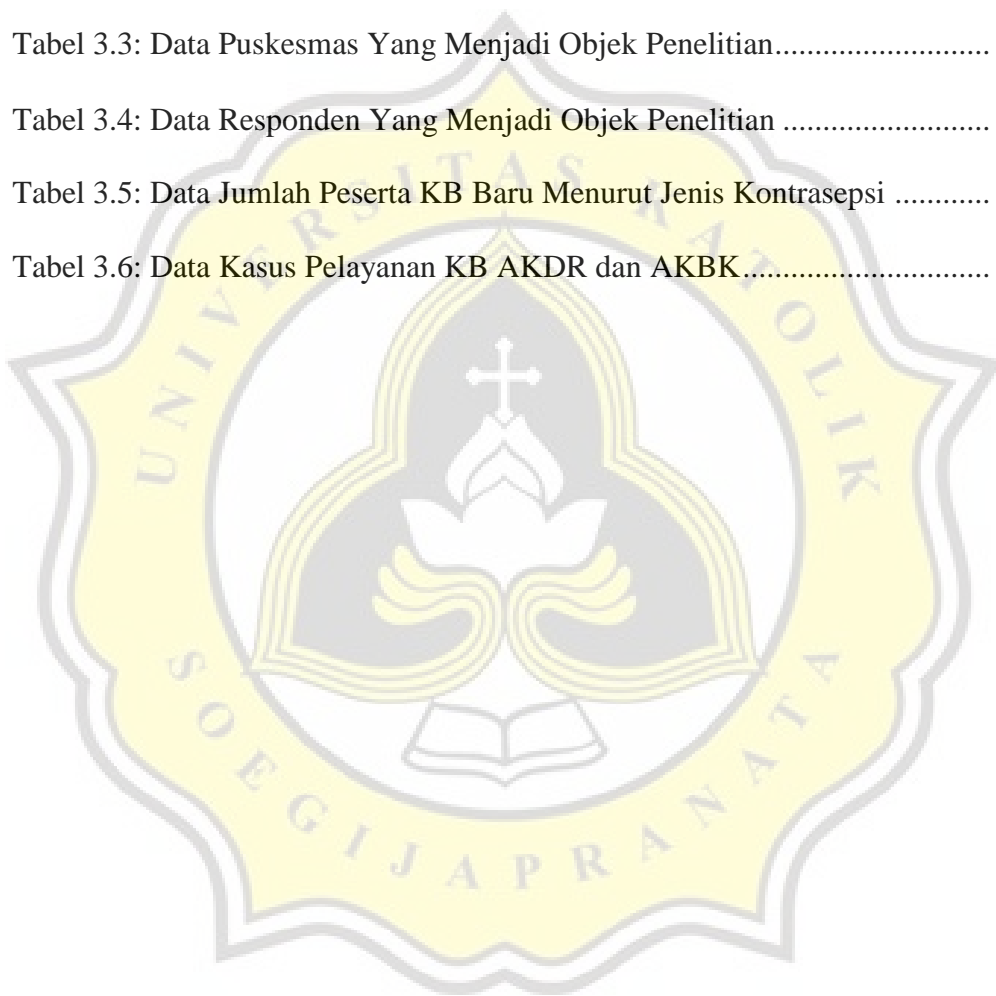
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Konsep	14
Gambar 1.2 : Kerangka Teori	21
Gambar 3.1 : Alur Penyelesaian Sengketa Antara Pasien dengan Bidan yang Menerima Pelimpahan Wewenang	109



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Perbedaan Delegasi dan Mandat	48
Tabel 3.1: Data Tenaga Kesehatan Kabupaten Kendal	67
Tabel 3.2: Daftar Tenaga Dokter dan Bidan Puskesmas	77
Tabel 3.3: Data Puskesmas Yang Menjadi Objek Penelitian.....	77
Tabel 3.4: Data Responden Yang Menjadi Objek Penelitian	78
Tabel 3.5: Data Jumlah Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi	79
Tabel 3.6: Data Kasus Pelayanan KB AKDR dan AKBK.....	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Calon Responden	151
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Persetujuan Menjadi Responden	152
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara 1 (Kepala Dinas Kesehatan)	153
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara 2 (Ketua IBI)	155
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara 3 (Dokter Pemberi Pelimpahan Wewenang)	157
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara 3 (Bidan Penerima Pelimpahan Wewenang)	159
Lampiran 7 : Surat Ijin Studi Pendahuluan	161
Lampiran 8 : Surat Ijin Penelitian	162
Lampiran 9 : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	163
Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	164
Lampiran 11 : Surat Pemberitahuan Tentang Pelaksanaan Ijin Penelitian Dari Dinas Kesehatan	167
Lampiran 12 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	168
Lampiran 13 : Contoh Surat Pelimpahan Wewenang, STRB, SIPB, dan Sertifikat CTU.....	169

DAFTAR SINGKATAN



AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBK	: Alat Kontrasepsi Bawah Kulit
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
AKI	: Angka Kematian Ibu
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
CTU	: <i>Contraceptive Technology Update</i>
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
FIGO	: <i>Federation of International Gynecologist Obstetrician</i>
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
ICM	: <i>International Confederation Of Midwives</i>
KB	: Keluarga Berencana
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
MPEB	: Majelis Pertimbangan Etik Bidan
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIPB	: Surat Izin Praktik Bidan

SPO : Standar Prosedur Operasional
STRB : Surat Tanda Registrasi Bidan
UU : Undang-Undang
WHO : *World Health Organization*



ABSTRAK

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dan strategis dalam penurunan angka kematian ibu. Pencegahan kematian dan kesakitan ibu merupakan alasan utama diperlukannya pelayanan keluarga berencana. Bidan dapat menerima pelimpahan wewenang dari dokter untuk melakukan tindakan medis dalam pelayanan keluarga berencana. Namun, permasalahan hukum dapat timbul jika tindakan medis yang dilakukan oleh bidan sebagai pelimpahan wewenang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional akibat dari tidak ada pengawasan dari dokter, yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan bagi pengguna pelayanan keluarga berencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan keluarga berencana serta mengkaji faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum bagi bidan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber dan responden, sedangkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Analisa data secara kualitatif dan disajikan dengan narasi, tabel dan gambar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan keluarga berencana di Puskesmas Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan, semua bidan sudah mendapatkan perlindungan preventif berupa STRB, SIPB, sertifikat CTU, SPO, dan surat pelimpahan wewenang. Namun, surat pelimpahan wewenang yang diberikan kepada bidan belum sesuai dengan prosedur karena 100 % surat pelimpahan wewenang tidak ada masa berlakunya dan 30 % surat pelimpahan wewenang yang tidak tersosialisasikan dan terdistribusikan. Faktor penghambat perlindungan hukum yaitu dari sisi yuridis dan sisi teknis. Faktor pendukung perlindungan hukum yaitu dari sisi teknis dan sisi sosiologis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bidan, Pelimpahan Wewenang, Tindakan Medis Pelayanan Keluarga Berencana, Puskesmas

ABSTRACT

Midwives are one of the health workers who have an important and strategic role in reducing maternal mortality. Prevention of maternal mortality and morbidity is the main reason for the need for family planning services. Midwives can receive delegation of authority from doctors to perform medical actions in family planning services. However, legal problems can arise if the medical action taken by the midwife as a delegation of authority is carried out not in accordance with standard operating procedures as a result of the absence of supervision from a doctor, which can cause health losses for users of family planning services

This study aims to determine the legal protection for midwives who perform medical actions as a delegation of authority in family planning services and to examine the inhibiting and supporting factors of legal protection for midwives. This study uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. The data used is primary data obtained from interviews with informants and respondents, while secondary data is from legislation, books and journals. The sampling method used is purposive sampling. Data analysis qualitatively and presented with narration, tables and pictures.

The results showed that the legal protection for midwives who took medical action as a delegation of authority in family planning services at the Kendal Public Health Center had been implemented, all midwives have received preventive protection in the form of STRB, SIPB, CTU certificate, SPO, and a letter of delegation of authority. However, the letter of delegation of authority given to the midwife was not in accordance with the procedure because 100% of the letter of delegation of authority had no validity period and 30% of the letter of delegation of authority was not socialized and distributed. The inhibiting factors for legal protection are from the juridical side and the technical side. The supporting factors for legal protection are from the technical side and the sociological ide.

Keywords: Legal Protection, Midwife, Delegation of Authority, Medical Actions for Family Planning Services, Public Health Center